

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menganalisa tentang tantangan pemerintah Maladewa khususnya dibawah pemerintahan Presiden Mohamed Nasheed dalam menerapkan kebijakan rendah karbon di Maladewa, dalam upaya menanggulangi degradasi lingkungan yang berpotensi mengancam aspek ekonomi, sosial, bahkan eksistensi masyarakat Maladewa secara keseluruhan. Perlu dipahami sebelumnya, bahwasanya Maladewa termasuk kedalam kategori Small Island Developing States (SIDS) yaitu negara berkembang dengan bentuk kepulauan kecil. Secara ekonomi, Maladewa merupakan negara yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan, karena itu Maladewa memiliki fokus yang tinggi terhadap pemanfaatan kedua sektor tersebut (Scheyvens, 2011). Dalam pemanfaatan kedua sektor tersebut dan menjalankan roda ekonominya, Maladewa sangat bergantung pada penggunaan mesin disel dengan bahan bakar fosil yang diperoleh melalui impor. Menurut MoEE (2011) mulai dari tahun 2000-2009 anggaran yang digunakan untuk impor bahan bakar fosil ini mencapai rata-rata 10-15% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Maladewa. Konsumsi bahan bakar fosil yang tinggi tersebut juga selaras dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh Maladewa. Menurut The World Bank (2022) pada tahun 2008 total emisi karbon per kapita di Maladewa mencapai angka 2,53 metrik ton dan selalu mengalami kenaikan di setiap tahun nya. Dari angka tersebut sektor pariwisata menyumbang 36% dan sektor perikanan sebesar 11% dari total emisi karbon Maladewa. Data tersebut menunjukkan betapa besarnya konsumsi dan emisi karbon yang dihasilkan oleh Maladewa serta ketergantungan Maladewa terhadap bahan bakar fosil (Bernard et al., 2010).

Kontribusi Maladewa dalam menghasilkan emisi karbon tersebut berbanding lurus dengan permasalahan degradasi lingkungan yang dihadapi, terutama emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Sejatinya permasalahan GRK ini telah menjadi perdebatan internasional, dikarenakan hal tersebut berdampak langsung terhadap pemanasan global. Sebagai negara kepulauan, secara geografis ketinggian rata-rata pulau di Maladewa hanyalah 1,5 meter di atas permukaan laut. Hal ini tentunya membuat Maladewa rentan akan bencana alam terutama kenaikan permukaan air laut. Menurut Powers (2012) kenaikan permukaan air laut ini akan bermuara pada rusaknya ekosistem pariwisata dan perikanan di Maladewa, bahkan berpotensi menurunkan 40% dari total PDB Maladewa. Naiknya permukaan air laut ini akan menimbulkan efek domino dengan terjadinya

abrasi dan banjir rob. Masifnya bencana yang berhubungan dengan kenaikan air laut ini berpotensi merusak berbagai infrastruktur umum, industri, dan pemerintah yang rata-rata letaknya sekitar 0,8-2 meter dari garis pantai. Selain itu, bencana lain yang turut menghantam Maladewa adalah rusaknya ekosistem laut yang selama ini menjadi mata pencaharian utama penduduk Maladewa. Terjadinya cuaca buruk dan pemutihan karang tentunya sangat mempengaruhi produktifitas para nelayan. Rusaknya terumbu karang akan bermuara pada menurunnya minat wisatawan asing dan hilangnya habitat perikanan (Powers, 2012).

Perubahan besar pun terjadi pasca terpilihnya Mohamed Nasheed sebagai presiden yang menggantikan Maumoon Abdul Gayoom, melalui pemilihan umum secara demokratis pertama di Maladewa pada tahun 2008. Suzanna Tornroth (2014) mengatakan bahwa Mohamed Nasheed dikenal sebagai sosok environmentalis yang memiliki perhatian tinggi terhadap lingkungan dan perubahan iklim, serta gagasan menjadikan Maladewa sebagai negara hijau. Gagasan tersebut lantas di aktualisasikan dengan inisiasi Pertemuan Kabinet Bawah Laut di Maladewa pada Oktober 2009. Pertemuan ini diselenggarakan di dasar laguna, yang dihadiri oleh pemerintah eksekutif dan sekretaris kabinet Maladewa. Presiden Nasheed dalam *The Guardian* (2009) menyatakan bahwa dirinya sedang mengirimkan pesan pada dunia terkait dampak dari perubahan iklim apabila tidak cepat ditangani secara global. Pertemuan ini berhasil membuka mata dunia terkait pentingnya dampak perubahan iklim terhadap eksistensi sebuah negara. Dari pertemuan ini Presiden Mohamed Nasheed menegaskan bahwasanya dirinya memiliki visi menjadikan Maladewa sebagai negara netral karbon pertama di dunia pada tahun 2020, dengan beralih pada energi terbarukan dan meningkatkan komitmen pada target emisi seminimal mungkin (Scheyvens, 2011).

Akan tetapi, penulis menemukan fakta bahwasanya terdapat kesenjangan antara konsep dan pengimplementasian dari kebijakan rendah karbon itu sendiri. Salah satu studi kasus ini penulis temukan dalam tulisan Scheyvens (2011) yang menemukan fakta bahwasanya pemerintah kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dalam pembangunan dan operasional resor pariwisata, tingginya emisi karbon yang dihasilkan dari perjalanan turis, rendahnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan wisatawan asing terkait kebijakan pajak karbon. Rendahnya pengawasan ini pun berbanding lurus dengan angka emisi karbon yang tidak menurun, bahkan dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya. Menurut *The World Bank* (2022) pada tahun 2012 total emisi karbon per kapita di Maladewa mencapai angka 2,87 metrik ton, hal ini merupakan

kenaikan yang cukup dratis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini justru menimbulkan dilema sekaligus pertanyaan terkait efisiensi kebijakan rendah karbon di Maladewa.

1.2 Rumusan Masalah

Apa tantangan pemerintahan Maladewa dibawah pemerintahan Presiden Mohamed Nasheed dalam menerapkan kebijakan rendah karbon pada tahun 2009-2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tantangan apa yang dhadapi oleh pemerintahan Maladewa dibawah kepemimpinan Presiden Mohamed Nasheed dalam menerapkan kebijakan rendah karbon pada tahun 2009-2012. Penelitian ini berangkat dari keresahan mengenai tidak kunjung turunnya total emisi karbon di Maladewa pasca diterapkannya kebijakan yang bersifat rendah karbon di Maladewa. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Maladewa dalam menerapkan kebijakan tersebut.

1.4 Tinjauan Pustaka

Untuk memahami kebijakan hijau Maladewa khususnya tentang kebijakan rendah karbon, penulis terlebih dahulu meninjau penelitian dari Suzanna Tornroth (2014) yang membahas sejauh mana politik hijau dapat menyelamatkan Maladewa dari degradasi lingkungan. Maladewa dibawah kepemimpinan Presiden Maumoon Abdul Gayoom memang dikenal memiliki industri pariwisata yang sangat maju, bahkan Presiden Gayoom dijuluki sebagai “*CEO of Maldives*” karena perannya yang sangat besar dalam membangun pondasi pariwisata Maladewa. Akan tetapi, dibalik maju nya sektor pariwisata tersebut terdapat hal yang harus dikorbankan yaitu kerusakan lingkungan. Hingga pada akhirnya kekuasaanya digantikan oleh Mohamed Nasheed yang sangat konsen terhadap agenda lingkungan. Dalam kepemimpinannya, Nasheed berfokus untuk merancang mitigasi perubahan iklim, membentuk peraturan, hukum, dan undang-undang yang bersifat ekosentris. Menurut Suzanna Tornroth (2014) politik hijau yang ideal adalah dengan mengkolaborasikan masyarakat sipil dan pemerintah, dengan interaksi dua arah yaitu pemerintah mampu mewakili suara rakyat dan rakyat harus mampu menerapkan kebijakan hijau yang dibentuk oleh pemerintah. Dari pernyataan tersebut, penulis menemukan sebuah celah kemungkinan,

bahwasanya kurangnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah Maladewa dalam menerapkan kebijakan hijau yang mengurangi efektivitas politik hijau di Maladewa.

Menurut Suzanna Tornroth (2014) efektivitas politik hijau di Maladewa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu politik dan sosial. Pasca lengsernya Maumoon Abdul Gayoom dari tahta kepresidenan, kondisi politik Maladewa sangat tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pendukung Gayoom yang menuntut aksi demonstrasi terhadap pemerintahan Mohameed Nasheed. Selain itu, Presiden Nasheed juga harus membereskan masalah korupsi dari anggota parlemen pemerintahan Gayoom dan peralihan dari masa kediktatoran ke demokrasi terbuka. Banyaknya permasalahan ini membuat pemerintah susah untuk berfokus dalam hal lingkungan. Beralih ke faktor sosial, yang mana masyarakat masih belum terbiasa untuk menerapkan kebijakan hijau karena pada masa kepemimpinan Gayoom sangat abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Sehingga masyarakat memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap kebijakan hijau (Tornroth, 2014). Dari dua faktor ini penulis beranggapan bahwa untuk mewujudkan politik hijau yang efektif, Maladewa masih membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat masih banyaknya aspek lain yang masih jauh dari kata stabil.

Sebelum menganalisa tantangan kebijakan rendah karbon di Maladewa, penulis mencoba menganalisa kebijakan serupa di negara yang berbeda yaitu di Kepulauan Seychelles. Kepulauan Seychelles merupakan negara di kawasan Afrika Timur yang memiliki kondisi serupa dengan Maladewa, yaitu tergabung dalam SIDS serta pendapatan nasionalnya bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan. Dalam tulisannya, Gossling dan Schumacher (2009) menyatakan bahwasanya sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor terhadap emisi global, yaitu sebanyak 5% emisi karbon dioksida (CO_2). Sumber emisi karbon dari sektor pariwisata ini didominasi oleh dua hal, yaitu; (1) penggunaan mesin disel, para pengelola hotel dan resor lebih memilih menggunakan generator berbahan bakar solar karena dinilai lebih efisien dan kuat meskipun efek sampingnya menimbulkan emisi berlebih; (2) transportasi udara, kondisi umum yang terjadi pada negara SIDS adalah masifnya aktivitas penerbangan akibat banyaknya turis mancanegara dan kondisi geografis kepulauan menuntut transportasi udara sebagai opsi utama. Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwasanya negara SIDS cenderung memiliki jumlah emisi yang tinggi dari sektor pariwisata. Menurut Gossling dan Schumacher (2009) kondisi ini lantas menimbulkan dilema bagi negara-negara SIDS dalam kasus ini Seychelles, yaitu sebesar 21% pendapatan nasional Seychelles berasal dari sektor pariwisata dan realitas bahwasanya sektor

pariwisata menjadi kontributor terhadap naiknya emisi global serta perubahan iklim. Dilema berikutnya adalah perihal mempertahankan citra destinasi alam natural, akan tetapi masih menggunakan bahan bakar fosil dan solar yang tidak ramah lingkungan (Gossling dan Schumacher, 2009).

Penulis menemukan celah bahwasannya berbagai dilema yang dialami oleh Seychelles ini akan menimbulkan tantangan dalam penerapan kebijakan rendah karbon. Menurut Gossling dan Schumacher (2009) berikut beberapa tantangan yang dialami oleh Seychelles dalam implementasi kebijakan rendah karbon, yaitu; (1) ekonomi periferi, yaitu negara yang terbelakang dalam aspek industri dan modal. Sehingga negaranya masih terkendala dalam aspek pembiayaan teknologi terbarukan; (2) rendahnya kualitas sumber daya manusia, Seychelles sangat kekurangan teknisi dan tenaga ahli dalam penciptaan dan pemeliharaan teknologi terbarukan; (3) ketergantungan pada mesin disel, masyarakat dan penyedia akomodasi pariwisata cenderung memilih penggunaan solar disel dibandingkan energi terbarukan karena dinilai lebih kuat dan efisien dibandingkan teknologi terbarukan yang mahal dan ringkih; (4) minimnya kesadaran wisatawan, masih banyak wisatawan yang tidak bijak dalam penggunaan energi dan dari survei yang dilakukan hanya sebesar 18,5% wisatawan saja yang setuju terhadap kebijakan pajak karbon sebagai kompensasi emisi sebesar €5 per malam. (Gossling dan Schumacher, 2009).

1.5 Kerangka Pemikiran

Deskripsi mengenai tantangan pemerintahan Maladewa dibawah pemerintahan Presiden Mohamed Nasheed dalam menerapkan kebijakan rendah karbon pada tahun 2009-2012 dapat dilihat melalui tiga kerangka pemikiran. Kerangka pertama menjelaskan perihal kerentanan perubahan iklim di negara kepulauan kecil berkembang (SIDS). Kerangka pemikiran kedua berisikan pembahasan implementasi mengenai ekonomi biru dalam negara SIDS. Terakhir, kerangka pemikiran ketiga berbicara perihal stabilitas politik dalam negara SIDS.

1.5.1 Kerentanan Perubahan Iklim di Small Island Developing States (SIDS)

Secara umum, negara yang termasuk dalam Small Island Developing States (SIDS) memiliki permasalahan yang serupa terkait perubahan iklim yaitu kenaikan permukaan air laut dan intensitas badai tropis. Menurut Lino Briguglio (1995) SIDS merupakan negara berkembang dengan wilayah yang kepulauan kecil, terisolir, dan memiliki lingkungan yang rentan terhadap

bencana alam. Berdasarkan karakteristik tersebut, SIDS telah diindikasikan oleh masyarakat internasional sebagai negara yang memiliki resiko tinggi terhadap dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perubahan iklim. Asumsi tersebut didukung oleh data dari UNCTAD (2002) bahwasanya 13 dari 25 negara yang menerima dampak terbesar dari bencana alam pada tahun 1980-an berasal dari negara SIDS. Kerentanan ini pun tidak lepas dari kondisi geografis negara SIDS yaitu berbentuk kepulauan kecil dengan ketinggian rendah diatas permukaan air laut, berdiri diatas lempeng vulkanik, dan berada di pesisir Samudera. Berikut beberapa permasalahan degradasi lingkungan yang dihadapi oleh negara SIDS, yaitu; (1) kenaikan permukaan air laut, kondisi ini timbul akibat pemanasan global yang menyebabkan cairnya es di kutub sehingga ketinggian permukaan air laut semakin meningkat. Menurut Ghina (2003) suhu lautan global telah meningkat secara signifikan sejak akhir 2000-an, dan lebih dari setengah peningkatan kandungan panas terjadi di pesisir lautan dengan pertumbuhan $0,04^{\circ}\text{C}$ per dekade; (2) badai tropis, perlu diketahui bahwasanya negara SIDS rata-rata memiliki iklim tropis dan rentan akan perubahan suhu ekstrim. Perubahan suhu ekstrim ini diproyeksikan mampu meningkatkan intensitas curah hujan rata-rata, yang mengarahkan pada terjadinya badai tropis dan banjir rob. Kedua bencana ini sangat berpotensi merusak fasilitas dan infrastruktur yang ada dalam negara SIDS; (3) abrasi, yaitu kondisi pengikisan tanah di daerah pesisir pantai oleh ombak dan arus laut. Hal ini dapat terjadi akibat tingginya gelombang laut, minimnya tanaman bakau, dan terganggunya keseimbangan alam di daerah pesisir; (4) keterbatasan air bersih, kondisi ini terjadi akibat pengeroposan tanah dan pengelolaan limbah yang buruk. Sehingga ketersediaan air bersih sangat bergantung pada tingkat abstraksi tanah akan air hujan (Ghina, 2003).

1.5.2 Ekonomi Biru di Small Island Developing States (SIDS)

Konsep “Ekonomi Biru” pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli pada tahun 2010, melalui tulisan “The Blue Economy: 10 Years, Innovations, 100 Million Jobs”. Dalam tulisannya, Pauli (2010) menyatakan bahwa dasar dari konsep ini adalah keresahan mengenai terdampaknya aspek sosial-ekonomi akibat degradasi lingkungan yang kini menjadi permasalahan global. Secara umum, ekonomi biru merupakan pembangunan aktivitas ekonomi melalui sektor maritim dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial, menekan resiko lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan ekologi laut sebagai fokusnya. Idealnya konsep ini sangat tepat untuk diterapkan di negara SIDS, mengingat kondisi geografisnya yang berbentuk kepulauan dan potensi sektor

maritim yang besar. Lautan memiliki peran penting sebagai penyerap karbon yang dapat mengurangi perubahan iklim, oleh sebab itu keberlanjutan ekosistem laut sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini selaras dengan salah satu agenda utama dari konsep ini yaitu menekan emisi karbon dan GRK seminimal mungkin dalam setiap aktivitas ekonomi (Pauli, 2010).

Berikut beberapa agenda dari ekonomi biru yang diadaptasi oleh negara SIDS, yaitu; (1) memahami nilai esensial modal dari alam sebagai dasar ekosistem laut yang sehat serta mendukung pengelolaan barang dan jasa kelautan berkelanjutan; (2) mempertahankan, mendorong, dan mempromosikan ekonomi biru di segala sektor; (3) mempromosikan energi rendah karbon dan energi terbarukan; (4) mengatasi kelangkaan sumber daya dan mempromosikan peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya alam; (5) memastikan ketahanan dari dampak perubahan iklim melalui kebijakan mitigasi yang adaptif; (6) mendukung pembangunan kapasitas teknis dari teknologi terbarukan; (7) mempromosikan pengelolaan berkelanjutan dari ekosistem dan sumber daya yang terbatas. Sejatinya agenda-agenda ini menjadi prinsip dasar bagi implementasi ekonomi biru di berbagai sektor yang mencakup perikanan, pariwisata dan energi terbarukan. Sektor tersebut memiliki dampak secara langsung terhadap keberlanjutan ekosistem kelautan. Tujuan dari dibentuknya agenda ekonomi biru tersebut adalah mengurangi dampak kumulatif dari sektor ekonomi terhadap sumber daya alam hayati laut. Banyak negara berkembang termasuk beberapa negara SIDS telah mengadopsi ekonomi biru pada tahap awal untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling adaptif dan solutif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di negara-negara SIDS (Ababouch, 2012).

1.5.3 Stabilitas Politik di Small Island Developing States (SIDS)

Kondisi stabilitas politik di SIDS tentunya memiliki permasalahan yang serupa, yaitu implementasi demokrasi yang masih jauh dari kata ideal. Instabilitas politik di SIDS ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan elit dalam mempengaruhi sebuah kebijakan, menurut Liam Campling (2006) di mayoritas negara SIDS kelompok elit sangat menguasai pemerintahan dan gurita bisnis pariwisata, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin besar dalam lapisan masyarakat. Bahkan, elit dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sebuah demonstrasi atau bahkan kudeta apabila kebijakan sebuah pemerintah tidak berjalan sesuai kepentingan politik

dan bisnisnya. Kondisi ini lantas menciptakan dilema yang berujung pada instabilitas dalam sebuah negara, yang mana di satu sisi hadirnya elit yang menguasai sektor privat dalam bidang pariwisata mampu meningkatkan roda perekonomian sebuah negara, akan tetapi di sisi lain terdapat tendensi monopoli bisnis dan korupsi akibat intervensi elit terhadap aktor pemerintah. Hal seperti ini sangat sering dijumpai di negara bagian ketiga, yang mana dilema ini sangat sulit untuk dilepaskan dan menjadi faktor utama bagi instabilitas politik negara berkembang (Campling, 2006).

Menurut Guillaumont (2010) kondisi politik di negara SIDS ini dapat dikatakan memiliki kerentanan secara struktural, yang dimaksud kerentanan struktural adalah kondisi rapuh atau tidak kuatnya sebuah pondasi dalam membentuk penyelenggaraan sebuah negara. Hal ini biasanya terjadi akibat pemilihan dan eksekusi kebijakan yang salah dari pemerintah setempat, tanpa adanya adaptasi dengan pola budaya masyarakat. Selain itu, kerentanan ini muncul sebagai efek domino dari instabilitas ekonomi seperti contohnya Krisis 1990-1997 yang melanda negara-negara Asia. Adanya guncangan ekonomi ini akan bermuara pada munculnya gerakan politik yang bersifat agresif untuk menuntut pemerintah mengusut perihal kesejahteraan masyarakat (Guillaumont, 2010).

1.6 Hipotesis

Berangkat dari latar belakang dan kerangka pemikiran yang tertera di atas, pemerintahan Maladewa dibawah kepemimpinan Presiden Mohamed Nasheed menghadapi tiga tantangan dalam menerapkan kebijakan rendah karbon pada tahun 2009-2012. Pertama, Kerentanan Perubahan Iklim Maladewa yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Kedua, beberapa adaptasi Sektor Ekonomi Biru Maladewa yang masih jauh dari kata ideal. Ketiga, terganggunya Stabilitas Politik di Maladewa yang memengaruhi konsen pemerintah dalam menegakkan kebijakan rendah karbon.

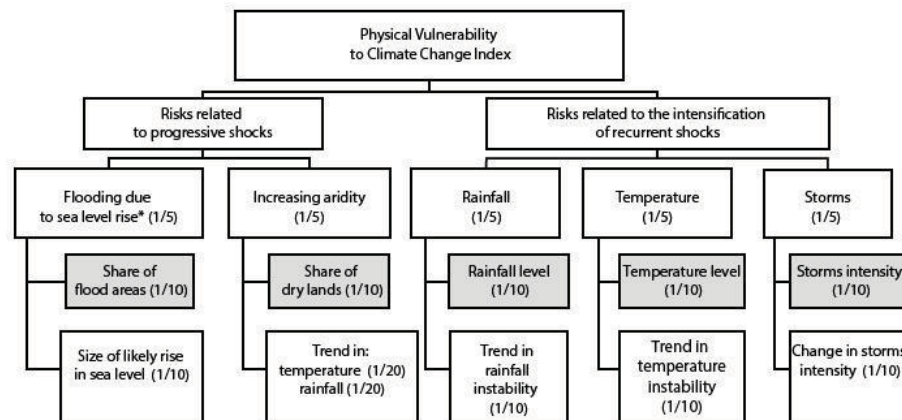
1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Kerentanan Perubahan Iklim

Dalam era kontemporer, perubahan iklim telah menjadi permasalahan internasional. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) iklim merupakan cuaca rata-rata

yang menjadi indikator keadaan atmosfer dalam periode tertentu, yang dipengaruhi oleh curah hujan, temperatur, dan angin. Iklim sendiri bersifat dinamis yang berubah secara terus menerus, karena adanya interaksi komponen kimia atau faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, radiasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam IPCC (2007) menyatakan bahwasanya perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang mana hal ini mampu mempengaruhi variabilitas dan komposisi atmosfer global dalam periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Aktivitas ini akan berdampak pada naiknya temperatur bumi akibat peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada lapisan atmosfer. Material GRK yang mempengaruhi komposisi atmosfer global yaitu metana, karbon dioksida, dan nitrogen. Perubahan iklim akibat pemanasan global ini akan menimbulkan efek domino seperti cuaca ekstrim, intensitas badai tropis, degradasi lingkungan, bencana alam, salinitas air laut, perubahan pola presipitasi, perubahan sifat ekosistem, dan eksistensi flora fauna di suatu wilayah (IPCC, 2007).



Gambar 1.1. Indeks Kerentanan Fisik Terhadap Perubahan Iklim (PVCCI)

Sumber : Guillaumont dan Simonet (2011)

Hal yang perlu di garis bawahi dalam penelitian ini adalah terkait kontribusi perubahan iklim terhadap degradasi lingkungan. Menurut Guillaumont dan Simonet (2011) untuk melihat seberapa besar dampak perubahan iklim terhadap suatu negara dapat menggunakan Physical Vulnerability to Climate Change Index (PVCCI). Berdasarkan PVCCI dalam Guillaumont dan Simonet (2011) berikut beberapa indikator terhadap perubahan iklim, yaitu; (1) potensi banjir dan kenaikan air laut; (2) tingkat kekeringan; (3) intensitas hujan; (4) temperatur udara; dan (5) intensitas badai. Indikator PVCCI telah diterapkan di banyak negara sebagai standarisasi dalam

mengukur dampak perubahan iklim bagi negaranya, terutama pada negara-negara kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim. Perhitungan indikator ini biasanya dipergunakan sebuah negara sebelum menyusun sebuah kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim (Guillaumont dan Simonet, 2011).

1.7.1.2 Adaptasi Ekonomi Biru

Untuk melihat tantangan penerapan kebijakan rendah karbon di Maladewa, penulis berfokus pada tiga sektor ekonomi biru yang paling kentara di negara SIDS yaitu; (1) perikanan, industri perikanan memegang kontribusi yang besar terhadap roda ekonomi negara-negara kepulauan kecil. Terlebih, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan memiliki konsumsi produk perikanan yang cukup tinggi. Akan tetapi, masifnya industri perikanan ini juga menjadi kontributor dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di negara tersebut; (2) pariwisata, industri pariwisata turut menjadi kunci dari keberlangsungan ekonomi di negara kepulauan kecil. Sektor ini sangat berkembang akibat daya tarik wisatawan yang sangat tinggi perihal keindahan alam natural yang ditawarkan negara tersebut. Keindahan alam ini mencakup pantai, laut, keragaman flora dan fauna. Bahkan, sebagian besar pendapatan nasional negara-negara ini bergantung pada sektor pariwisata. Dilemanya, justru sektor ini menjadi kontributor utama dari meningkatnya emisi di negara tersebut; dan (3) pengelolaan energi terbarukan, potensi pengelolaan energi terbarukan di negara kepulauan kecil ini sejatinya sangat menjanjikan apabila terealisasi dapat dengan baik. Akan tetapi, realisasinya selalu terhambat perihal pendanaan dan kurangnya sumber daya manusia dengan kualifikasi tenaga ahli (Sakhuja, 2015).

1.7.1.3 Stabilitas Politik

Stabilitas politik dalam era kontemporer memiliki peran besar dalam menentukan pembangunan sebuah negara baik dalam aspek ekonomi ataupun sosial. Menurut Diamond dan Lipset (1995) stabilitas politik adalah kondisi dimana lembaga pemerintah yang berdaulat memiliki kontrol bahwa daerah kekuasaannya tidak ada perubahan revolusioner, aman, dan terciptanya keteraturan. Menurut Crouch (1982) stabilitas politik dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai periode yang ditentukan dengan menjalankan program dan kebijakan sesuai batasan. Kedua, sistem pemerintahan bersifat adaptif dengan mampu menerima dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa merubah pola

kepemimpinan yang ada. Lebih lanjut, Diamond dan Lipset (1995) menjabarkan beberapa indikator stabilitas politik, yaitu; (1) adanya representasi demokrasi; (2) transisi kekuasaan yang sehat; (3) penghormatan terhadap hak sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM), (4) kekuatan sistem yurisprudensi, yaitu kepatuhan terhadap tatanan kebijakan konstitusional dan pemerintahan yang ada; (5) kapabilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya; (6) intensitas pemberontakan dan kudeta, (7) angka kriminalitas dan korupsi; (8) potensi terorisme dan ancaman keamanan nasional; (9) kemampuan pemerintah dalam menjalin hubungan dengan kekuatan regional dan internasional melalui kerjasama bilateral ataupun multilateral; (10) stabilitas ekonomi dan finansial. Kemudian, terdapat poin penting diluar indikator tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas politik sebuah negara, yaitu pengaruh kelompok elit dalam mengintervensi atau mempengaruhi pemerintahan dalam sebuah negara, yang mana hal ini sangat sering terjadi di negara-negara berkembang (Crouch, 1982).

Kemudian, merujuk pada poin kelima dari indikator stabilitas politik yaitu tentang kapabilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya. Penulis menilai aspek ini sebagai indikator penting dari tantangan kebijakan rendah karbon Maladewa di kepemimpinan Presiden Mohamed Nasheed. Menurut Carl J. Fredrick dalam Agustino (2008) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah tentunya harus membentuk sebuah kebijakan publik untuk menciptakan keteraturan sosial. Menurut Subarsono (2011) model implementasi dari kebijakan adalah bersifat “*top down*” yaitu adanya penekanan dari pihak yang diatas ke pihak yang dibawah. Kemudian, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; (1) komunikasi, dalam hal ini perumus kebijakan harus memahami apa yang harus dilakukan untuk eksekusi kebijakan tersebut dengan menginformasikan perihal kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan, cara, dan sasarannya. Hal ini biasa ditempuh melalui sosialisasi publik dengan perantara media masa, elektronik, ataupun kampanye; (2) sumber daya, dalam hal ini perumus perlu memperhatikan sumber daya yang dimiliki yang mencakup sumber daya manusia dan sumber daya finansial agar kebijakan dapat berjalan sesuai ekspektasi; (3) disposisi, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dalam praktiknya, agar tidak menjadi bias; dan (4) struktur birokrasi, yang mana hal ini bertugas untuk

mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan (George C. Edward III dalam Agustino, 2008).

1.7.2 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada rentang kepemimpinan Presiden Mohamed Nasheed di Maladewa. Merujuk pada pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki jangkauan dari tahun 2009 hingga 2012. Tahun 2009 dipilih karena tahun tersebut merupakan awal mula Presiden Mohamed Nasheed menginisiasi kebijakan rendah karbon, hingga pada akhirnya beliau turun dari tahta kepemimpinan presiden Maladewa di tahun 2012.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini studi kepustakaan diperoleh melalui dua data. Data pertama diperoleh melalui rilisan resmi pemerintah Maladewa. Rilisan ini berupa laporan tahunan dan berita naskah kebijakan. Kemudian, data kedua diperoleh melalui terbitan buku, jurnal, artikel, berita, surat kabar, makalah, dan laporan hasil survei. Selain itu, studi kepustakaan penulis juga berdasarkan pada data situs resmi dari organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam upaya pembuktian hipotesis dan menjawab rumusan masalah, penulis menerapkan pendekatan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif memungkinkan penulis untuk menggambarkan pola dari konsep dan wawasan dari hasil intepretasi bahan linguistik atau visual (Flick, 2013). Oleh sebab itu, Teknik analisis kualitatif berfokus pada intepretasi penulis terkait dengan sumber-sumber data yang didapat. Sumber data yang dianalisis adalah resmi dari laman pemerintah Maladewa, serta karya ilmiah peneliti pendahulu terkait permasalahan yang relevan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari :

BAB I : dalam BAB pertama ini, penulis menyantumkan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian.

BAB II : dalam BAB kedua, memuat analisa kerentanan Maladewa terhadap perubahan iklim melalui indikator PVCCI atau kebencanaan pada tahun 2009-2012.

BAB III : pada BAB ketiga, penulis menganalisa adaptasi dan implementasi ekonomi biru di Maladewa tahun 2009-2012.

BAB IV : pada BAB keempat, memuat perihal instabilitas atau terganggunya stabilitas politik di Maladewa tahun 2009-2012.

BAB V : pada BAB kelima, penulis melakukan elaborasi kesimpulan yang didapat dari proses analisis penelitian yang telah dilakukan.